



---

## **Krisis Pendidikan Pengungsi : Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh**

**Luthfi Marisa Dewi, Reni Windiani, Fendy Eko Wahyudi**

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The educational crisis experienced by Rohingya refugee children in Bangladesh became even more difficult when a new flow of refugees arrived in 2017. The Bangladeshi government did not pay more attention towards the crisis, putting it into the international spotlight and causing UNICEF as an international organization to attempt and solve the problem. The purpose of this study is to explain UNICEF's attempt in spreading the norms of children's education rights towards the refugee children in Bangladesh. This study will use three concepts of conceptual thinking, namely the concept of Norm Diffusion, the concept of International Organization and the concept of Humanitarian Action with qualitative research methods and descriptive analytical research types. The results of the study show that UNICEF attempts to spread the norms of the right to education for Rohingya refugee children through a number of different programs, such as the launch of the LCFA program, the launch of the Myanmar curriculum in 2020 in collaboration with the Bangladesh government for the education of Rohingya refugee children.*

**Keywords:** *UNICEF, Education crisis, Rohingya refugee children, Bangladesh, Norms diffusion, Humanitarian action*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah usaha oleh semua orang dan untuk semua orang yang bermanfaat sepanjang hidup. Dalam banyak dokumen internasional, pendidikan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar dibawah hukum hak asasi manusia regional maupun internasional (McCowan, 2013). Pendidikan termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948 pada pasal 26), Konvensi Berkaitan dengan Status Pengungsi (1951), kemudian Konvensi Hak Anak 1989 (pada pasal 28, 29 dan 32), serta pada Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia Dakar (2000) (Lee, 2013: 1–9). Hak atas pendidikan mencakup luasan mengenai pembelajaran terkait tanggung jawab guna menjadi warga negara yang baik. Mencakup juga hak kewarganegaraan, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Pendidikan mengubah kondisi individu maupun lingkungan. Secara langsung pendidikan dapat membuka potensi yang

ada dalam diri, dari yang terpinggirkan menjadi terdorong untuk meraih kemakmuran dan kemajuan. Direktur Jenderal *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk Perdamaian pada Januari 1997 menyampaikan bahwa;

*“Berinvestasi dalam pendidikan selain untuk menghormati hak fundamental namun juga untuk membangun perdamaian dan kemajuan bagi masyarakat dunia, setiap anak atau generasi muda adalah warisan dan sangat penting untuk di lestarikan.”* (UNESCO, 1997).

Sebagaimana pendidikan merupakan proses seumur hidup yang dapat menyelamatkan, mengubah bahkan menopang kehidupan (Latchem, 2018). Namun berbeda dengan pendidikan bagi anak-anak di daerah konflik atau anak-anak yang menjadi pengungsi akibat konflik, mereka sangat rawan dan menderita selama konflik serta pemindahan secara paksa (Machel, 2001). Banyak tantangan dalam memberikan pendidikan dalam keadaan darurat bagi anak-anak. Seperti halnya anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh, yang menjadi pengungsi akibat konflik yang terjadi di negara sendiri.

Dalam praktiknya, anak-anak pengungsi Rohingya memiliki akses yang sangat terbatas untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak pengungsi Rohingya tidak diberikan identitas kewarganegaraan dan tidak diakui oleh negara Myanmar sehingga sulit bagi mereka untuk memiliki masa depan yang produktif (Shohel, 2020). Pemerintah Myanmar mengambil status kewarganegaraan untuk etnis Rohingya. Akibatnya Rohingya mengalami diskriminasi dan tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan pergerakan dan pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupan mereka (Bhatia et al., 2018). Bangladesh merupakan negara yang paling banyak dituju oleh kelompok Rohingya. Jumlah pengungsi Rohingya melonjak, hampir 700.000 orang yang menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh.

Etnis Rohingya melakukan eksodus massal ke Bangladesh kemudian menetap di kamp-kamp pengungsian di tanah sempit Distrik Cox’s (Bhatia et al., 2018: 105–122). Setengah dari jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh adalah anak-anak. (UNHCR, 2019). Masa depan yang cerah jauh dari jangkauan anak-anak pengungsi Rohingya, selama mereka masih dalam keterpurukan, kehancuran, dan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Oxfam International, 2021). Masa depan yang suram akan terus menjadi ancaman bagi anak-anak pengungsi Rohingya jika mereka tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh tinggal di Cox’s Bazar yang merupakan tempat dengan kondisi kriminalitas yang tinggi terhadap anak-anak, mereka mengalami tindakan kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan dijadikan incaran perdagangan manusia (Inter Sector Coordination Group, 2017).

Bangladesh belum meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951. Namun, meratifikasi *Convention on The Right of Childs 1989* yang membuat Bangladesh memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pencari suaka dan pengungsi anak. Salah satu hak yang wajib di penuhi adalah hak pendidikan. Kemudian terdapat kebijakan dimana pemerintah Bangladesh tidak memberikan akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi Rohingya (Human Rights Watch, 2019). Akibat keterbatasan akses tersebut, terjadilah krisis dan darurat pendidikan anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Krisis pendidikan oleh anak-anak pengungsi Rohingya menjadi sorotan internasional lantaran menjadi suatu krisis besar . Salah satu perhatian internasional datang dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)

(UNICEF, 2021). UNICEF hadir bersama mitranya langsung menegaskan pentingnya perolehan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. UNICEF menyerukan kepada pemerintah Bangladesh agar mengizinkan dan memberikan akses pendidikan yang layak terhadap anak-anak Rohingya berlandaskan pada *The Convention on the Rights of the Child 1989*.

Terdapat beberapa penelitian mengenai anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pertama, penelitian berjudul "*Health and Educational Status of Rohingya Refugee Children in Bangladesh*" oleh Mahbub Alam Prodip yang membahas mengenai status kesehatan dan pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kedua, penelitian berjudul "*Education in emergencies: challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh*" oleh M.Mahruf C.Shohel, membahas mengenai tantangan untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian. Terakhir, penelitian berjudul "Upaya UNICEF dalam Menangani Pengungsi Anak Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2018" oleh Yessi Adeyna Saputri, penelitian ini membahas peran UNICEF secara umum di berbagai sektor dalam menangani pengungsi anak Rohingya di Bangladesh.

Menimbang berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya menganalisis mengenai upaya UNICEF sebagai organisasi internasional dalam membantu anak-anak Rohingya memperoleh pendidikan. Menjelaskan bagaimana UNICEF bekerjasama dengan mitra yang ada di Bangladesh untuk menyebarkan norma hak pendidikan dan memenuhi pendidikan bagi anak-anak Rohingya. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual *Norm Diffusion*. Sebagaimana norma merupakan suatu kepantasan maka adanya penyebaran norma yang dilakukan oleh aktor dapat membawa suatu perubahan kebiasaan dalam masyarakat (Finnemore & Sikkink, 1998).

## **PEMBAHASAN**

Saat terjadinya eksodus massal ke Bangladesh pada tahun 2017, lebih dari 40% anak-anak pengungsi Rohingya masih berusia di bawah 12 tahun (BBC, 2017). Anak-anak pengungsi Rohingya datang dengan perasaan trauma akibat konflik dan tindakan kekerasan yang mereka alami. sehingga besar harapan mereka dapat memiliki masa depan yang baik saat menjadi pengungsi. Sebelumnya Bangladesh telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Pada tahun 1997 anak-anak pengungsi menerima kesempatan memperoleh pendidikan formal di kamp pengungsi. Namun, pemerintah Bangladesh tetap membatasi mereka untuk masuk pada tingkat dasar, taman kanak-kanak dan sekolah menengah (Feeny, 2001). Kemudian tahun 2007 pemerintah Bangladesh menyetujui pembangunan sekolah di kamp pengungsi untuk pertama kalinya. Pemerintah Bangladesh juga mengizinkan penggunaan kurikulum nasional Bangladesh untuk pendidikan informal di kamp pengungsi tersebut.

Di Bangladesh, hak atas pendidikan bagi para pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak hanya bersyarat tetapi juga secara sistematis diabaikan. Sehingga pada tahun 2019, pemerintah Bangladesh melarang buku pelajaran bahasa Bengali di kamp pengungsi, pemerintah Bangladesh mengusir semua siswa pengungsi dari sekolah di luar kamp sebagai bagian dari sekolah Rohingya dari pendidikan nasional Bangladesh (Mst, Habiba, & Karim, 2020). Anak-anak pengungsi Rohingya mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan secara formal.

Alasan pemerintah Bangladesh menolak pendidikan formal terhadap anak-anak pengungsi ialah karena pemerintah Bangladesh merasionalisasi penolakan pendidikan

mereka dalam hal tidak pernah ingin kembali ke repatriasi (Mst et al., 2020). Namun, analisis ini melihat bahwa pemerintah Bangladesh belum sepenuhnya dapat berkomitmen dalam memenuhi pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya sesuai dengan Konvensi hak anak 1989. Pasal 22 ayat 1 Konvensi Hak Anak 1989 yaitu :

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah yang tepat guna memastikan bahwa seorang anak yang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, menerima perlindungan yang tepat serta bantuan kemanusiaan dalam Konvensi ini dan dalam hak asasi manusia internasional.

Pasal 28 ayat 1 yaitu :

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara bertahap dan atas dasar kesempatan yang sama.

Pencabutan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh membuat keadaan krisis semakin sulit terutama krisis pendidikan. Sebagai pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan, pendidikan sangatlah penting. Dalam laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyatakan bahwa pendidikan melindungi anak-anak dan remaja pengungsi dari perekrutan paksa ke dalam kelompok-kelompok bersenjata, pekerja anak, eksploitasi seksual dan pernikahan anak. Pendidikan juga memperkuat ketahanan masyarakat. Pendidikan memberdayakan dengan memberikan pengungsi pengetahuan dan keterampilan untuk hidup produktif, memuaskan dan mandiri (UNHCR).

Keadaan krisis terutama saat masuknya arus pengungsi baru pada tahun 2017, yang dialami oleh anak-anak pengungsi Rohingya tentunya menjadi sorotan dan perhatian masyarakat internasional. Beberapa *Non-Governmental Organization* (NGO) lokal dan internasional juga melakukan aksi kemanusiaan dalam membantu krisis ini salah satunya adalah Save the Children (Save the Children, 2017). Selain itu, UNICEF sebagai aktor internasional berbentuk organisasi internasional di bawah payung United Nations (UN) juga turut berperan menjadi agen penggerak serta koordinator khusus dalam membantu anak-anak pengungsi Rohingya dalam memperoleh pendidikan (UNICEF). UNICEF merupakan salah satu lembaga formal yang memiliki peran penting dalam menanggapi krisis yang terjadi pada pengungsi Rohingya (Sida & Schenkenberg, 2019).

### **Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan**

Dalam analisisnya Finnemore (1996) menyatakan bahwa organisasi internasional adalah penyebar norma dalam sistem internasional. Salah satu fungsi organisasi internasional berperan sebagai aktor, forum dan instrumen yang berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan normatif dari sistem politik internasional. UNICEF berfokus pada hak dan kesejahteraan anak-anak di dunia termasuk anak-anak pengungsi Rohingya. *UNICEF for every child* adalah bentuk nyata dari gerakan dan upaya UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki visi dan misi untuk menjamin hak dan perlindungan terhadap anak-anak di seluruh dunia (UNICEF, 2014). UNICEF mengampanyekan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh hak untuk pendidikan. Sebagaimana pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan tercantum dalam Konvensi Hak Anak 1989 (Theirworld, 2018).

Sejak awal krisis, UNICEF bersama mitranya telah bekerja sama untuk memberikan solusi dengan melindungi dan mendukung anak-anak yang terkena dampak

darurat kemanusiaan ini. Hal yang umum dilakukan UNICEF adalah mensosialisasikan serta mengajak seluruh masyarakat internasional untuk berdonasi dalam membantu anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh (UNICEF). Dalam situs resmi UNICEF di internet, banyak kampanye untuk mensosialisasikan keadaan darurat serta krisis yang terjadi pada anak-anak pengungsi Rohingya. Pada tahun 2017 UNICEF mengajukan banding dan membuat kampanye khusus untuk membantu anak-anak pengungsi Rohingya dalam krisis saat mereka tiba di Bangladesh. Dalam kampanye yang diajukan oleh UNICEF, kebutuhan pendidikan untuk anak-anak pengungsi Rohingya termasuk di dalamnya (UNICEF).

Dalam laporan berjudul *"Futures in the balance: Building hope for a generation of Rohingya children"* UNICEF mengatakan bahwa masyarakat internasional harus berinvestasi dalam mendukung pendidikan berkualitas dan keterampilan hidup untuk semua anak-anak Rohingya. Laporan yang diumumkan UNICEF sebagai upaya bersama untuk membangun landasan baru untuk hak dan peluang anak-anak Rohingya dalam jangka panjang. Hal tersebut sebagai bukti nyata UNICEF sebagai *role of agent* yang berperan melakukan sosialisasi penyebaran norma untuk hak pendidikan (Theirworld, 2018). Menurut UNICEF upaya internasional sangat diperlukan untuk memastikan pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya di Cox's Bazar (Anadolu Agency, 2018). Edouard Beigbeder sebagai perwakilan UNICEF Bangladesh menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan untuk anak-anak Rohingya sangat penting dan dibutuhkan guna mempersiapkan mereka menghadapi masa depan mereka.

*"If we don't invest in education now, we will face very real dangers because seeing the 'lost generation' of Rohingya children, children do not have the skills they need to deal with their current emergency situation, and cause them to will not be able to contribute to their society any time when they can return to Myanmar"* Edouard Beigbeder. (Anadolu Agency, 2018).

UNICEF berperan sebagai *norm entrepreneur* yang menginisiasi norma hak pendidikan ini. UNICEF mengatakan bahwa hanya terdapat 140.000 dari setengah juta anak-anak Rohingya yang telah terdaftar di pusat pembelajaran pada Juli tahun 2018. Namun, pada pusat pembelajaran tidak ada kurikulum yang dipatenkan, ruang kelas sering penuh dan juga sesak serta kekurangan fasilitas lainnya. UNICEF mencoba upaya untuk melonggarkan pembatasan-pembatasan terkait fasilitas pendidikan untuk anak-anak pengungsi Rohingya (Sida & Schenkenberg, 2019).

Dalam penyebaran norma hak memperoleh pendidikan, UNICEF mendorong seluruh pihak dan menegaskan bahwa pendidikan bagi anak pengungsi Rohingya sangatlah penting. Di bawah sektor pendidikan UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh sebagai bentuk upaya advokasi dari UNICEF yang memperjuangkan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Hasil dari advokasi tersebut membuat pemerintah Bangladesh membentuk suatu kebijakan baru.

### **Program Pendidikan LCFA dan Percontohan Myanmar Curriculum Pilot**

Kampanye dunia untuk pendidikan dalam keadaan darurat mampu membuat semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi internasional, lembaga bantuan dan lembaga keuangan menyadari komitmen dan janji mereka kepada anak-

anak terlepas dari apa identitas mereka (Manuchehr, 2011). Pada tahun 2017, dibentuk Sektor Pendidikan sebagai respon darurat untuk mendukung pendidikan anak Rohingya di Cox's Bazar. Sektor Pendidikan Cox's Bazar berdiri dibawah pengawasan dan pedoman pemerintah Bangladesh (Sadia, 2021). Tujuan Sektor Pendidikan adalah mendukung akses pendidikan yang berkualitas bagi anak serta remaja pengungsi Rohingya. Sektor Pendidikan mendukung pemerintah Bangladesh dalam memperkuat penyediaan layanan pendidikan (Global Education Cluster).

Bersama dengan Refugee Relief and Repatriation Commissioner (RCCC) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Massal, Sektor Pendidikan akan memastikan pendidikan yang tidak terputus untuk anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh (IOM, 2020). Pembentukan Sektor Pendidikan mulai dilihat sebagai komitmen yang dibangun oleh pemerintah Bangladesh untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak pengungsi Rohingya. Sebagai langkah awal transisi ke pembelajaran formal, Sektor Pendidikan berencana untuk memulai proyek yang dipimpin oleh UNICEF. UNICEF bersama dengan *Save the Children* memimpin sektor pendidikan untuk respon Rohingya di Bangladesh yang dikenal sebagai Sektor Pendidikan Cox's Bazar (OCHA, 2021).

UNICEF mulai menyebarkan norma hak pendidikan dengan menyatakan bahwa pendidikan anak-anak Rohingya dalam keadaan krisis yang besar. UNICEF mendesak seluruh pihak termasuk pemerintah Bangladesh untuk berinvestasi dalam pendidikan anak-anak Pengungsi Rohingya. Dalam realisasinya, UNICEF bersama mitranya berhasil meluncurkan program pendidikan yaitu Learning Competency Framework and Approach (LCFA) pada tahun 2017 dan bersama dengan pemerintah Bangladesh menerapkan kurikulum Myanmar bagi pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya setelah Bangladesh mencabut kebijakan kurikulum nasional Bangladesh pada tahun 2019.

Sebelum memastikan anak-anak pengungsi Rohingya mendapatkan pendidikan berkualitas, UNICEF menciptakan program perlindungan bagi pengungsi anak Rohingya di kamp pengungsian, yaitu *Child Friendly Space* (CFS). CFS dirancang sebagai tempat untuk menciptakan lingkungan perlindungan diharapkan dapat melindungi pengungsi anak yang sangat rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi terutama anak perempuan. Terdapat sekitar 180.000 anak yang telah menjangkau aktivitas di *Child Friendly Space* dan menjadi tempat untuk anak-anak yang membutuhkan dukungan khusus (UNICEF, 2017).

Pada awal 2018, program pembelajaran informal LCFA dikembangkan untuk anak-anak Rohingya oleh UNICEF. Faktor yang memungkinkan terjadi dari penawaran pendidikan terstruktur ini adalah penyelarasan pendekatan dengan tujuan dan sasaran pemerintah, karena pusat pembelajaran bergerak dapat dipindahkan saat repatriasi seperti solusi yang dipilih oleh pemerintah Bangladesh, yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, mitra pembangunan dan pendidikan kemanusiaan dalam pengembangan program dan pembiayaan dapat dianggap sebagai pencapaian penting oleh pemerintah Bangladesh (March, 2021).

UNICEF mengembangkan kurikulum non-formal LCFA tersebut tentunya di bawah sektor pendidikan. Program tersebut dapat dilihat sebagai implementasi dari aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh UNICEF. Dalam mengembangkan LCFA, UNICEF melatih para guru yang mereka rekrut dan menandai mereka bersama dengan guru nasional dari Cox's Bazar. LCFA memetakan bagaimana anak-anak usia sekolah

Rohingya dapat memperoleh pendidikan yang relevan dalam lingkungan pendidikan yang protektif yang mengusulkan perluasan waktu kontak saat ini untuk setiap anak dari dua jam pengajaran setiap hari (Moniruzzaman, 2021). LCFA mengikuti kurikulum standar pengungsi. Sektor pendidikan mengajarkan beberapa mata pelajaran diantaranya Matematika, Bahasa Inggris, Sains, Bahasa Burma, dan Kecakapan Hidup (Sadia, 2021).

Hadirnya LCFA membuka harapan bagi akses pendidikan. Kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks anak-anak Rohingya untuk memberikan literasi dasar kepada mereka. Hingga saat ini, sebagian besar anak telah belajar melalui LCFA, terutama diperoleh anak-anak berusia 4 sampai 14 tahun. LCFA dibuat sebagai tindakan darurat bagi anak-anak pengungsi Rohingya (UNICEF, 2022). Dalam laporannya, UNICEF menyebutkan bahwa terdapat 293.750 anak mengakses pendidikan berkualitas. Remaja berusia 15 sampai 18 tahun mengakses pendidikan menengah. serta remaja berusia 19 sampai 24 tahun mengakses pelatihan keterampilan kejuruan (UNICEF, 2020).

Pada tahun 2019 pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan kurikulum nasional Bangladesh terhadap pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya. Kemudian pada Januari tahun 2020 muncul kebijakan baru dari pemerintah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menyetujui kurikulum lain untuk anak-anak Rohingya, yang dikenal dengan kurikulum Myanmar (*Myanmar Curriculum Pilot*). Di bawah program kemitraan dengan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), pemerintah Bangladesh menyetujui proposal usulan dari PBB yang akan memberikan pendidikan formal dengan kurikulum Myanmar kepada anak-anak pengungsi Rohingya. Hal ini dijelaskan oleh Mahbub Alam Talukder, Komisararis pengungsi, bantuan dan repatriasi Bangladesh (TheDiplomat, 2020).

Langkah Bangladesh mengambil kebijakan dipuji oleh masyarakat internasional. UNICEF menjadi pemimpin dalam program peluncuran kurikulum Myanmar ini. UNICEF dan pemerintah Bangladesh mulai memperkenalkan kurikulum dengan awalan 10.000 anak-anak Rohingya hingga usia 14 tahun akan diajarkan menggunakan kurikulum Myanmar. kemudian anak-anak di atas 14 tahun akan menerima pelatihan keterampilan. Terbukti bahwa UNICEF telah mendorong pemerintah Bangladesh agar memberikan akses pendidikan dengan kurikulum baru pada anak-anak Rohingya. Penyebaran norma hak pendidikan yang dilakukan UNICEF membuat perubahan pada kebijakan pemerintah Bangladesh (TheDiplomat, 2020).

Menteri Luar Negeri Bangladesh 2020, Masud bin Momen, menjelaskan persetujuan dari pemerintah Bangladesh terhadap pendidikan baru tersebut.

*“Pemerintah merasa perlu untuk menjaga harapan masa depan anak-anak Rohingya tetap hidup dengan memperluas pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada mereka, Upaya-upaya ini akan membantu mempercepat perluasan pendidikan bagi para pengungsi dan memungkinkan kami untuk memenuhi keinginan pendidikan orang-orang Rohingya secara lebih komprehensif. Ketika kondisi menjadi kondusif dan pengungsi dapat kembali ke Myanmar dengan aman, bermartabat dan berkelanjutan, upaya ini juga akan membantu anak-anak berintegrasi kembali ke dalam sistem pendidikan dan masyarakat Myanmar”.* (Indigenoussherald, 2022).

Pemerintah Bangladesh menyatakan kepantasan kepada anak pengungsi Rohingya untuk menerima pendidikan. Dukungan internasional sangat kuat untuk

pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. PBB menggambarkan program ini sebagai langkah yang positif dan indikasi yang jelas dari komitmen pemerintah Bangladesh untuk memastikan akses pembelajaran bagi anak-anak dan remaja Rohingya, serta untuk membekali para pengungsi dengan keterampilan dan kapasitas yang tepat untuk masa depan mereka ketika kembali ke Myanmar saat kondisinya memungkinkan (The Organization of World Peace, 2020).

Moyukh Mahtab juru bicara UNICEF untuk Bangladesh mengatakan bahwa kurikulum Myanmar diluncurkan pada bulan November 2021. Tujuan UNICEF untuk meningkatkan secara bertahap sehingga pada tahun 2023, semua anak usia sekolah diajarkan melalui kurikulum Myanmar (Sumon, 2022). Peluncuran program percontohan kurikulum Myanmar ini tidak hanya dirancang dalam waktu yang singkat namun juga sudah memperhitungkan perencanaan kedepannya bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Dapat dilihat kolaborasi yang terikat antara pemerintah Bangladesh dan juga dorongan dari UNICEF menghasilkan solusi yang signifikan khususnya pemberian pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh penting dalam memberikan akses pendidikan melalui percontohan kurikulum Myanmar terhadap anak-anak Rohingya. Hal ini juga terjadi atas kerjasama dari UNICEF dan pemerintah Bangladesh itu sendiri. Konvensi Hak Anak, sebuah konvensi internasional yang telah diratifikasi Bangladesh, menjelaskan bahwa pendidikan dapat dan harus memastikan pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara maksimal sambil meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas kelak (Martes, 2020).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebaran norma hak pendidikan muncul saat anak-anak Rohingya menjadi setengah dari mayoritas pengungsi Rohingya di Bangladesh dan mengalami krisis pendidikan. Krisis pendidikan pada anak-anak Rohingya menjadi perhatian internasional. Pemerintah Bangladesh memberikan keterbatasan akses pendidikan terhadap anak-anak pengungsi Rohingya. UNICEF sebagai organisasi internasional yang melindungi dan menjamin hak kesejahteraan anak berupaya menyebarkan norma hak pendidikan tersebut dengan melakukan advokasi terhadap pemerintah Bangladesh, kampanye internasional agar semua pihak internasional berinvestasi pada pendidikan anak-anak Rohingya, serta membuka donasi untuk anak-anak pengungsi Rohingya pada situs UNICEF. Dalam aksi kemanusiaannya pada tahun 2017 UNICEF berhasil meluncurkan kurikulum nonformal yang dikenal dengan LCFA untuk memenuhi pendidikan anak Rohingya yang genting karena masuknya arus pengungsi baru. Kemudian hasil dari advokasi dan usulan oleh UNICEF terbukti pada tahun 2020 ketika pemerintah Bangladesh mengumumkan peluncuran kurikulum pendidikan baru bagi anak-anak pengungsi Rohingya yang disebut dengan *Myanmar Curriculum Pilot*. Kurikulum Myanmar ini diluncurkan sebagai tujuan dari pemerintah Bangladesh untuk masa depan anak-anak pengungsi Rohingya yang perlu dijaga dan diperjuangkan sebagaimana ketika mereka dapat kembali ke Myanmar suatu saat nanti jika kondisinya sudah memungkinkan.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, MS D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fendy Eko Wahyudi S.IP., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing II. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah membantu penulis untuk menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap agar Ibu Reni, Bapak Fendy, dan Ibu Hermeni selalu dalam keadaan sehat dan segala tanggung jawab yang dimiliki diberi kelancaran.

## REFERENSI

- Anadolu Agency. (2018). UNICEF urges to invest in Rohingya children's education. Retrieved May 5, 2022, from [https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/unicef-urges-to-invest-in-rohingya-childrens-education/1237996?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/unicef-urges-to-invest-in-rohingya-childrens-education/1237996?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wapp)
- Bhatia, A., Mahmud, A., Fuller, A., Shin, R., Rahman, A., Shatil, T., ... Balsari, S. (2018). The Rohingya in Cox's bazar: When the stateless seek refuge. *Health and Human Rights*, 20(2), 105–122.
- Feeny, T. (2001). Rohingya Refugee Children in Cox's Bazar, Bangladesh. *Draft Discussion Document for UNICEF*, (June), 1–82.
- Finnemore, M. (1996). Norms, culture, and world politics: insights from sociology's institutionalism. *International Organization*, 50(2), 325–347.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Global Education Cluster. (n.d.). Bangladesh. Retrieved June 19, 2022, from educationcluster.net website: <https://www.educationcluster.net/country/bangladesh>
- Human Rights Watch. (2019). Bangladesh: Rohingya Children Denied Education. Retrieved from [hrw.org website: https://www.hrw.org/news/2019/12/02/bangladesh-rohingya-children-denied-education](https://www.hrw.org/news/2019/12/02/bangladesh-rohingya-children-denied-education)
- Indigenoussherald. (2022). UN, Global Community laud education for Rohingya children. Retrieved June 19, 2022, from <https://www.indigenoussherald.com/TripuraNews/un-global-community-laud-education-for-rohingya-children-4965.html>
- Inter Sector Coordination Group. (2017). Humanitarian Response Plan - September 2017 / February 2018 - Rohingya Refugee Crisis. Retrieved March 15, 2022, from Iom website: <https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-humanitarian-response-plan-september-2017-february-2018-rohingya>
- Latchem, C. (2018). Education for sustainable development. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-6741-9\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-10-6741-9_15)
- Lee, S. E. (2013). Education as a Human Right in the 21st Century. *Democracy & Education*, 21(1), 1–9.
- Machel, G. (2001). *The Impact of War on Children*. Vancouver: UBC Press, 2001,.
- Manuchehr, T. (2011). Education right of children during war and armed conflicts. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 15, 302–305.
- March, R. (2021). *Bangladesh*. (March).
- Martes. (2020). Bangladesh: Rohingya Children get Acces to Education. Retrieved

- May 16, 2022, from Amnesty International website: <https://www.amnistia.org/ve/noticias/2020/01/13391/bangladesh-rohingya-children-get-access-to-education>
- McCowan, T. (2013). *Education as a Human Right* (1st ed.). Bloomsbury Publishing.
- Moniruzzaman, H. M. (2021). *DEPARTMENT OF EDUCATION AND SPECIAL EDUCATION EDUCATION FOR ROHINGYA DISPLACED CHILDREN A case study on providing education at NGO-run Temporary Learning Centres ( TLCs ) in Bangladeshi refugee camps .*
- Mst, A., Habiba, U., & Karim, F. (2020). *No education – lost generation : The right to education of stateless Rohingyas in Bangladesh.*
- Oxfam International. (2021). Bangladesh Rohingya refugee crisis. Retrieved March 15, 2022, from Emergency Response website: <https://www.oxfam.org/en/what-we-do/emergencies/bangladesh-rohingya-refugee-crisis>
- Pringle, J. D., & Hunt, M. R. (2015). *Humanitarian Action*. (January). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05544-2>
- Sadia, S. (2021). *Experiences and Challenges of Non-governmental Organizations ( NGO ) s professionals in Ensuring the Right to Education for the Rohingya Refugee Children in Cox ' s Bazar Experiences and Challenges of Non-governmental Organizations ( NGO ) s professionals.*
- Save the Children. (2017). *Rohingya Crisis Response Strategy 2017-2020*. (November 2017), 8. Retrieved from <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/rohingya-crisis-response-strategy-2017-2020>
- Shohel, M. M. C. (2020). Education in emergencies : challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh ABSTRACT. *Education Inquiry*, 00(00), 1–23. <https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1823121>
- Sida, L., & Schenkenberg, E. (2019). Synthesis of Rohingya Response Evaluations of IOM, UNICEF and UNHCR. *Synthesis of Rohingya Response Evaluations*, (December). Retrieved from <https://www.unhcr.org/5e453ea64.pdf>
- Simmons, B. A., & Martin, L. L. (2002). International organizations and institutions. *Handbook of International Relations*, 192.
- Sumon, S. (2022). Hopes abound as Myanmar curriculum reaches Rohingya refugee children in Bangladesh. Retrieved May 15, 2022, from arabnews website: <https://www.arabnews.com/node/2078556/world>
- The Organization of World Peace. (2020). Bangladesh Allows Education For Rohingya Refugee Children. Retrieved May 15, 2022, from The Organization of World Peace website: <https://theowp.org/bangladesh-allows-education-for-rohingya-refugee-children/>
- UNICEF. (n.d.-b). Help the Rohingya children in Bangladesh. Retrieved May 5, 2022, from <https://help.unicef.org/donate-rohingya-children-bangladesh-0?language=en>
- UNICEF. (2014). Urgent need to improve the situation of children in Myanmar's Rakhine State | Press centre. Retrieved March 15, 2022, from unicef website: [http://www.unicef.org/media/media\\_74002.html](http://www.unicef.org/media/media_74002.html)
- UNICEF. (2017). Child Friendly Spaces. Retrieved June 17, 2022, from <https://www.unicef.org/topics/child-friendly-spaces>
- UNICEF. (2020). *Humanitarian Action For Children 2015*. (August), 1–14.
- UNICEF. (2021). Rohingya Crisis. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95714-2\\_300222](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95714-2_300222)
- UNICEF. (2022). UNICEF: Education milestone for Rohingya refugee children as

Myanmar curriculum pilot reaches first 10,000 children. Retrieved May 12, 2022, from <https://www.unicef.org/rosa/press-releases/unicef-education-milestone-rohingya-refugee-children-myanmar-curriculum-pilot>